

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara yang terdiri dari kawasan yang luas, dari zaman dahulu sudah didatangi oleh pengaruh India dan China yang beragama Hindu dan Budha. Kedua-duanya adalah kuasa-kuasa besar dengan peradaban yang tinggi. Pengaruhnya telah menyebar luas sampai ke pulau Melayu. Kedatangan orang Cina dan India membawa kebudayaan yang subur di pulau Melayu, membuat kawasan kepulauan Melayu mulai berkembang dan pengaruhnya masih terlihat sampai kini. Kedatangan orang Cina dan India menyebabkan terjadilah akulturasi dengan budaya setempat dan akhirnya lahirlah beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang salah satunya adalah kerajaan Langkasuka.¹

Kerajaan Langkasuka awal berdirinya pada tahun 80 – 100 M, yang letaknya berada di pantai Timur Semenanjung tanah Melayu diantara sengkora dengan Kelantan. Ibu kotanya terletak di suatu daerah didalam wilayah Patani. Pada zaman kerajaan Langkasuka orang Patani masih percaya pada hal – hal yang bersifat gaib dan masih memuja benda yang dipercayai mempunyai ruh.

Kerajaan Langkasuka mulai mencapai kemajuan ketika pertama kalinya menciptakan kapal-kapal sebagai alat transportasi menuju ke negeri China. Kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Langkasuka menunjukkan ekonomian kuat, Raja Langkasuka mempunyai bala tentera yang berani dan rakyat hidup dengan aman dan damai membuat kerajaan ini terkenal di mata luar terutama China.²

Semasa Sriwijaya memerintah kerajaan Langkasuka, kawasan ini dijadikan penyebaran agama Budha-Singhaless. Kerajaan Langkasuka dijadikan tempat penyebaran kebudayaan meneruskan bahasa Melayu Sankrit, agama, filsafat, ilmu pelayaran, seni musik, seni bina dan peralatan diraja. Pada tahun 1906 seorang sejarawan Barat yang bernama Charles Otto Blagden menemukan unsur sastra Melayu Klasik yaitu tentang kisah misteri Kerajaan Langkasuka di Patani.

Negara Patani mempunyai sejarah yang lama, yang tidak kalah dari Negara-negara yang ada di tanah Semenanjung Melayu lainnya seperti Malaka, Johor, Selangor dan Lain-lain. Sejarah lama Patani merujuk kepada kerajaan Melayu tua pengaruh India-

¹ Mohd Zamri A. Malik. “*Patani dalam Tamadun Melayu*” 1994

² Dr. H. Saifullah, SA, MA, “*Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Langkasuka. Seorang ilmuwan kajian Manusia dan Sosial di *Prince of Songkhla University* di Patani seni madakakul berpendapat bahwa Langkasuka adalah letaknya di Patani.

Kerajaan Langkasuka mengganti Nama menjadi Patani Darussalam yang dipimpin dan dikenal dengan kerajaan Kesultanan Patani sangat terkenal dengan pusat Pelabuhan besar di Nusantara. Raja-raja yang memegang tahta kerajaan Patani. Kerajaan Patani terbagi menjadi dua keturunan. Pertama dari keturunan kerajaan Sriwangsa di Kota Mahligai.

Patani mencapai puncak kemakmurannya pada masa pemerintahan Ratu-ratu yang terdiri dari Ratu Hijau (1584-1616 M.), Ratu Biru (1616-1624 M.), Ratu Ungu (1624-1635 M.), Ratu Kuning (1635-1688 M.). Pada masa ini jumlah penduduk bertambah dan padat kalau dibandingkan dengan Negara-negara Melayu yang lain di semenanjung Tahan Melayu. Ia disifatkan sebagai sebuah pusat perdagangan yang penting bagi pedagang-pedagang Eropa dan Asia. Maka dapat dikatakan bahwa, pada abad-abad yang lalu Patani merupakan zaman keemasan dan zaman kegemilangan yang disinari dengan nilai-nilai keislaman. Agama Islam dapat merubah masyarakat melayu Patani kepada pemikiran yang lebih maju dan mantap. Kemajuan dalam bidang Agama, Pendidikan, Perdagangan dan Kebudayaan ini membuat Patani menjadi sebuah Negeri yang makmur.³

Hubungan Patani dengan Thailand setelah Ayudhaya jatuh ke tangan Burma pada tahun 1767 M. Disebabkan karena pihak Thailand meminta bantuan uang dari Sultan Patani, tapi permintaan itu tidak dihiraukan oleh Sultan, hal ini menyebabkan pihak Siam atau Negara Thailand merasa dihina dan sangat marah pada kerajaan Patani. Pada masa ini Patani sedang mengalami kemajuan yang begitu cepat dicapai oleh bangsa Melayu Patani, maka mengundang keirihatian bagi pemerintah Siam-Thai terhadap Patani dan tekadnya untuk menguasai Negera Patani semakin nampak.

Akhirnya pemerintahan Thai mulai melakukan penyerangan terhadap negeri Patani, namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Dengan tekad yang dirancang oleh Siam-Thai, pada akhirnya mereka berhasil menguasai Patani pada tahun 1785 M., di Rasmikan Negera Patani menjadi sebahagian wilayah Siam-Thai pada tahun 1902, dan dihapuskan dari peta dunia.

Kalau kembali kepada sejarah dahulu mengenai pergerakan yang berlaku di Patani untuk membebaskan orang-orang Minoritas Muslim dari pemerintahan Thailand sampai saat ini kondisi masyarakat mayoritas Muslim di Patani semenjak tahun 2004 mulai beberapa peristiwa, kedukaan terhadap Masyarakat Patani di Thailand Selatan, pada tanggal 25

³ Lihat Tuntutan Nasional. (TUNAS), Patani dahulu dan Sekarang, PMIPTI Bandung edisi vii, 1989

Oktober, enam anggota unit pertahanan sipil yang diangkat oleh pemerintah untuk menjaga desa ditangkap berdasarkan ketentuan darurat militer, dituduh memberikan senjata mereka kepada militan. Beberapa ribu orang kemudian datang ke kantor polisi di Takbai, Narathiwat. Mereka datang untuk memprotes, dan menuntut ketidakadilan pemerintahan militer.

Akhirnya pasukan keamanan menembak kerumunan, menewaskan tujuh orang. Tidak dapat menemukan pemimpin kelompok, polisi dan pasukan militer menangkap lebih dari 1,300 orang memaksa mereka untuk merangkak dengan tangan terikat di belakang punggung mereka, memukul mereka dengan senapan, dan kemudian mereka disusun dalam beberapa lapisan dalam truk untuk dibawa ke kamp militer sejauh 90-mil di Patani Inkayut.

Ketika truk pertama tiba itu menemukan bahwa satu orang telah meninggal dalam perjalanan. Tidak ada tindakan yang diambil untuk segera membongkar atau bahkan menginformasikan orang-orang yang bertanggung jawab atas kendaraan lain, beberapa di antaranya tidak datang sampai berjam-jam kemudian. Pada saat semua truk diturunkan, 78 orang tewas karena sesak napas atau patah tulang sampai mati. Pada akhirnya, sebagian besar korban dibebaskan, 58 didakwa dengan kerusakan harta milik Negara dan kepemilikan senjata.⁴

Sampai saat ini di Patani keadaan yang susah semakin parah oleh karena sistem militerisme yang masih berlaku di Patani. Masyarakat tidak bisa berkumpul dan memperjuangkan haknya. Karena rasa takut yang menghantui warga Melayu di provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat sekarang ini. Fenomena ini muncul khususnya setelah merebaknya sejak kekerasan awal 2004. Rasa saling curiga berkembang di antara kedua golongan. Apalagi jika mereka tidak saling kenal. Orang-orang Melayu Muslim selatan dianggap sebagai pengkhianat di atas tanah miliknya sendiri. Dengan berlaku harian, kasus atau kejadian yang menghilangkan nyawa korban warga Melayu Muslim di Selatan Thailand tidak bisa dihitung, istri tanpa suami, anak tanpa ayah, murid tanpa guru, masjid tanpa imam, warga tanpa pemimpin, masyarakat tanpa pemuda untuk membangun.

100 Tahun UU Darurat Militer – 10 Tahun Konflik, Dunia Internasional Masih Bungkam Peraturan Darurat (Emergency Decree) yang diberlakukan bagi tiga Provinsi dan sebagian daerah provinsi Songkla di provinsi selatan sejak pada tahun Juli 2005. Peraturan Darurat itu menggantikan UU Darurat Militer (Martial Law) dan harus diperbaharui setiap 90 hari dengan persetujuan sidang Kabinet. Jadi, bukan produk hukum yang dikeluarkan atau

⁴ Arifin binji “ปาดานีประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมาลาญ”, Hatyai, 2550, hal. 9- 43.

disetujui Parlemen, apalagi berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Substansi Peraturan Darurat sepenuhnya melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Anti Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Sejak lama pemerintah Thailand yang mengaku berideologi Buddhisme itu melakukan diskriminasi rasial terhadap warga Melayu Patani yang menghuni wilayah-wilayah Patani ratusan tahun lampau. Dengan Peraturan Darurat itu, maka pemerintah Thailand dapat melakukan penahanan selama 30 hari tanpa dakwaan kepada siapapun yang dicurigai, memeriksa dan menangkap warga tanpa jaminan keselamatan dan pembelaan, serta melakukan penyadapan telepon kepada sembarang rumah penduduk warga Melayu di wilayah Selatan. Peraturan itu juga memberi kekebalan kepada pihak keamanan (tentara dan polis) dari segala gugatan, sehingga dikritik oleh pemerhati hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) akan menimbulkan suasana impuniti (tidak ada pertanggungjawaban hukum).

Ironis, tidak ada respon yang menandai dari masyarakat internasional. Seakan-akan dunia menutup mata dan bungkam terhadap pelanggaran berat HAM (hak asasi manusia) yang dilakukan pemerintah Thailand sejak konflik dilanda 10 tahun ini. Sampai saat ini sudah ramai warga Melayu yang ditahan secara paksa, tanpa bukti kesalahan yang nyata. Ada juga warga yang diincar pihak keamanan dengan alasan terlibat gerakan kemerdekaan yang bersenjata. Setiap hari adalah ketegangan dan kedekatan pada kematian bagi warga di Patani. Itu belum termasuk kasus pembunuhan dan penghilangan orang yang terdata.

Satu masalah terbesar yang tidak dapat diatasi (atau sengaja tidak mau diatasi) oleh kerajaan Thai ialah masalah keadilan. Tiga undang-undang (Undang-undang Darurat, Dekret Darurat serta Akta Keselamatan Dalam) yang menghapus Hak Asasi Manusia dan membataskan kebebasan rakyat, pihak berkuasa Thai telah membuat banyak tangkap atas orang Melayu Patani hanya berdasarkan aduan, syak atau tangkap muat secara sembrono, dengan alasan mereka itu terlibat keganasan, atau perjuangan atau sebarang serangan tanpa bukti kukuh. Siapa yang bersuara lantang atau mengkritik kerajaan akan dicap sebagai “penentang” atau pemberontak.⁵

Sampai sekarang masyarakat Islam di bagian Selatan Thailand masih dihantui berbagai macam teror dari konflik-konflik yang masih saja terjadi di tengah-tengah

⁵ Mohd Zamberi A. Malek “ *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*” Perpustakaan Negara Malaysia, 1993.

kehidupan mereka. Dari hati terdalam para masyarakat Patani tetap fokus pada cita-cita luhur mereka, yaitu mereka ingin Patani merdeka.

Berangkat dari realitas kondisi di atas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang konflik bagi masyarakat Patani, dan penelitian ini penulis angkat dengan judul “Faktor-faktor pendorong konflik masyarakat Patani di Thailand selatan

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, disimpulkan rumusan masalah berikut ini:

Mengapa terjadi konflik Masyarakat Patani dengan Pemerintah Thailand di Thailand Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan Karya tulisan ilmiah ini di maksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang sisi lain Ilmu Hubungan Internasional yang didalamnya menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan konflik di Thailand Selatan

D. LANDASAN TEORI

Untuk memahami suatu permasalahan dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian di atas, di perlukan adanya sebuah kerangka berfikir. Kerangka pemikiran ini terdiri dari teori dan konsep yang berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori konflik domestik

1. Teori konflik domestik

Konflik adalah suatu kondisi dimana tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang bersaing, bertabrakan dan akibatnya terjadilah agrasi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (schelling).

Situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang diantara beberapa orang, kelompok atau organisasi.

Sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua kelompok yaitu memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam upaya mencapai tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama.

Perbedaan dalam tujuan

Dalam suatu organisasi biasanya terdiri dari atas berbagai macam bagian yang bisa mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini kalau kurang adanya koordinasi dapat menimbulkan adanya konflik. Sebagai contoh : bagian penjualan mungkin ingin meningkatkan volume penjualan dengan memberikan persyaratan-persyaratan pembelian yang lunak, seperti kredit dengan bunga rendah, jangka waktu yang lebih lama, seleksi calon pembeli yang tidak terlalu ketat dan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh bagian penjualan semacam ini mungkin akan mengakibatkan peningkatan jumlah piutang dalam tingkat yang cukup tinggi. Apabila hal ini dipandang dari sudut keuangan, mungkin tidak dikehendaki karena akan memerlukan tambahan dana yang cukup besar.

Teori. Domestic tersebut menjadikan otoritas sipil melemah. Keterlibatan itu lantas berimplikasi pada naiknya kembali militer dalam *politik*.

Menurut Abdul Janbar konflik domestic, ditandai dengan perpecahan juga memisahkan Clinton dan Obama soal kebijakan domestic. Hillary bertumbuh di era konflik yang jenuh yang masih menjadi warna politik AS.⁶

Obama adalah seorang yang bebas, dan bicara terus terang. Obama merasa lebih bebas dari Hillary untuk mengatakan apa tidak dia mau. Dia termasuk orang pertama Demokrat yang tidak takut atau malu pada apa yang diyakini. Sikap ini sekaligus membuatnya bisa bertindak pragmatis sehingga lebih bebas untuk berayun ke kelompok kanan, atau tengah, bilamana diperlukan. Domestic agar menjadi penggerak, pendorong, dan perangsang pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak lagi sekadar penopang penerimaan Negara. Semuanya meningkat. Sementara apabila diekspor dalam bentuk bahan mentah maka kekayaan alam tersebut hanya berperah sebagai penopong penerimaan pemerintah saja. sebab-sebab konflik *sosial* penyebab konflik sangatlah kompleks dan tidak berdiri sendiri, tetapi dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan latar peristiwa. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang *ekonomi, politik, agama*, dan kepentingan

⁶ Ir. Abdul Janbar Yoesoef, MM, Kunci Sureyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan. 201

lainnya. setidaknya ada dua kepentingan berbeda yang menjadi penyebab munculnya konflik tersebut. Kepentingan pertama, kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras dari Vietnam merupakan kepentingan politik. Kepentingan kedua, para petani yang tergabung dalam FSPI menolak adanya impor beras karena dapat menurunkan harga beras di pasar nasional sehingga dapat merusak pendapatan petani dan ini merupakan kepentingan ekonomi. Dua kepentingan tersebut (politik dan ekonomi) telah melatarbelakangi munculnya konflik tersebut. Indonesia memiliki struktur masyarakat yang unik. Secara horizontal, Indonesia ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan perbedaan yang bersifat kedaerahan. Perbedaan secara horizontal ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.⁷

Wilayah Asia Selatan menemukan ekspresi formal pertamanya dalam bentuk Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) pada tahun 1985. Keanggotaan organisasi ini, dan karenanya komposisi daerah, terdiri dari tujuh negara bagian:

Selain keragaman etnis, agama dan bahasa, ada yang hebat keragaman politik di benua Asia Selatan, meski banyak negara-negara Asia Selatan telah muncul dari pengalaman bersama di bawah pemerintahan kolonial Bangladesh, India, Maladewa dan Sri Lanka bersifat demokratis republik, Bhutan dan Nepal adalah monarki, dan Pakistan telah diperintah oleh Jenderal Musharraf sejak kudeta militer tahun 1999.1 Etnis dan Isu ideologis juga mendapat perlakuan yang berbeda. Di Bangladesh, India, Maladewa dan Sri Lanka, negara ini secara formal sekuler dan nondenominasional, Meskipun beberapa referensi ke komunitas religius memang ada dalam setiap kasus. Pakistan, bagaimanapun, secara formal adalah sebuah republik Islam, dan Nepal adalah sebuah kerajaan Hindu. Mungkin satu-satunya faktor umum di antara negara-negara ini adalah bahwa sampai batas tertentu ada tingkatan representasi pemilihan, dengan satu-satunya pengecualian Bhutan.

Di negara bagian, komposisi etnis dan agama penduduknya adalah juga sangat beragam. Selain minoritas yang signifikan dalam etnis dan agama istilah, ada juga hubungan lintas batas yang penting antara etnis dan komunitas agama di berbagai negara bagian di wilayah ini. Lainnya kata-kata, batas negara tidak tertutup, etnik dan

⁷ More From Zaki R. Fajri, ilmu dasar. **Hlm 1-20.2014**

religious daerah homogen Kekurangan homogenitas ini sering menjadi penyebab intrastate konflik komunal yang mudah ditransfer ke tingkat antar Negara melalui hubungan etnis yang dibagi dengan masyarakat di negara-negara tetangga. Bisa, Sebenarnya, diperdebatkan bahwa kawasan ini ditandai dengan lintas batas budaya dan etnis, dan keragaman intraborder.

Beragam pengalaman politik, ideologi, identitas etnik dan kondisi ekonomi di seluruh dan di dalam negara berpose signifikan tantangan, apriori, untuk pengelolaan konflik di wilayah ini. Seperti yang terjadi di banyak daerah lain, Asia Selatan telah semakin terbebani apa yang disebut sebagai "ancaman keamanan non-tradisional", seperti etnis dan pemberontakan etno-nasionalistik yang melemahkan kemampuan Negara institusi untuk mengelola konflik.² Konflik internal ini terutama terjadi sulit ditangani karena, tidak seperti kekerasan yang disponsori Negara negara lain, hanya sedikit peraturan yang ada yang memungkinkan terjadinya konflik internal dikelola secara efektif. Selain itu, ada banyak potensi sosial, Kontes politik dan ekonomi antar perwakilan berbeda unit administrasi (negara bagian, provinsi, komune, dll), non-negara pengelompokan dan individu, upaya mengacaukan lebih lanjut untuk mengelola secara efektif konflik di semua tingkatannya.

Konflik adalah ciri masyarakat yang tak terelakkan, namun mungkin lebih umum dalam komunitas yang mencakup beragam identitas budaya dan disparitas ekonomi. Biaya konflik kekerasan sering terjadi tidak proporsional tinggi dibandingkan dengan taruhan asli, dan seringkali ditanggung oleh orang-orang yang memiliki sedikit kontrol atas pengambilan keputusan atau pengaruhnya atas mereka yang bisa mengurangi kekerasan. Dinamika konflik kekerasan adalah sringkali sedemikian rupa sehingga mereka dengan putus asa menjebak sejumlah besar orang. Hebat konflik internal secara langsung berkontribusi terhadap ribuan kematian dan cedera, tidak hanya di kalangan kombatan, tapi juga di kalangan warga sipil tak bersenjata. Jadi, sementara akar penyebab konflik dan tingkat di mana mereka terjadi penting untuk dipahami, dampak konflik terhadap masyarakat di Asia Selatan juga sangat tertarik dengan tulisan ini.⁸

⁸ Shiva Hari Dohal, Haris Gazdar, *Internal Conflict and Regional Security in South Asia Approaches, Perspectives and Policies*. hlm 50-57 2003.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian adalah penggambaran dan penjelasan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Untuk mengetahui hasil dari hipotesis penelitian menggunakan data yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati kemudian setelah data terkumpul dan lengkap. Dipilih di susah secara sistmeatis untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang akan di bahas dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut. ⁹

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan digunakan Penelitian sekunder, yaitu melalui buku, jurnal, majalah, internet dan media lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian ini akan menggunakan data yang berasal dari dokumen yaitu ada yang dari buku, jurnal, internet, surat kabar dan sumber daya lainnya yang terkait.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bukan berupa data angka melainkan data penggambaran mengenai suatu perilaku atau fenomena. Metode diskriptif memungkinkan pendeskripsian perilaku manusia dalam konteks kebulatan menyeluruh, sebab suatu fenomena hanya akan dapat ditangkap maknanya dalam keseluruhan.¹⁰

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mampu memberikan uraian yang jelas, skripsi ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi

- a. Latarbelakang
- b. Masalah, rumusan masalah,
- c. Tujuan penelitian,
- d. Kerangka teori, metode penelitian
- e. Sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II. GAMBARAN UMUM

bab ini menjelaskan Mengapa sejarah terjadi konflik dalam Negara antara pemerintah dan masyarakat patani dari zaman dulu sampai sekarang belum menyelesaikan konflik.

BAB III. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KONFLIK MASYARAKAT PATANI DENGAN PEMERINTAH THAILAND DI THAILAND SELATAN

bab ini menjelaskan sebab terjadi konflik masyarakat Patani dan pemerintah Thailand di Thailand Selatan

- a. Faktor Politik

¹⁰ Ita Kusuma Sukardi, *Dampak Gerakan Sosial Di Filiphina Terhadap Era Pemerintahan Gloria Macapgal Aroyo*, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim, 2010, Hal 18-20

- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Keagamaan
- d. Faktor Sosial

BAB IV. PENUTUP

bab ini berisi hasil penelitian secara ringkas dalam bentuk kesimpulan penelitian dari awal hingga akhir laporan penelitian ini, dan permintaan kritik dan saran atas kekurangan penelitian ini

BAB V. DAFTAR PUSTAKA

bab ini merupakan bahan rujukan dan daftar-daftar pustaka dari berbagai literatur seperti dokumen yang menjadi bahan acuan penulisan penelitian ini berbentuk buku-buku, dan berbagai website di internet.